

STUDI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI BOS TAHUN 2011 di SMP AL AZHAR 14, SMP 12 dan SMP 29 Kota SEMARANG

Oleh:

Ragil Septiana W, Aufarul Marom, Retna Hanani

Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

School Operational Assistance Program (BOS) is a very important program to support education funding. This study aims to determine the BOS program implementation and to identify factors that support or hinder the implementation. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection is done by documentation and interview with a number of informants. Data analysis is implemented through data reduction, data presentation, and verification. Phenomenon is approached by a model study of public policy implementation by George Edward III in which the factors that support and hinder the implementation are; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. There are factors that support and hinder the implementation of BOS in Semarang. This is due to the unfavorable socialization, the lack resources and the lack of competence to handle the policy. In addition there is also additional organizations involved in the implementation of BOS

Keyword: BOS, Implementation, factors of implementation.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, guna membebaskan dan meringankan beban biaya pendidikan, pemerintah telah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah. Secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, melalui program ini pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu

mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung orangtua siswa.

Kota Semarang merupakan kota dengan pemberian dana program Bantuan Operasional Sekolah yang cukup banyak dilihat dari jumlah sekolah yang ada, sehingga pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah pasti bukan perkara mudah.

Banyak Permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah 2011. Menurut ombudsman, pencairan dana ke sekolah pada 2011 sangat terlambat pada

beberapa periode. Ini disebabkan karena perubahan mekanisme penyaluran BOS 2011 dalam rangka menuju otonomi daerah tidak berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Selain itu beberapa faktor baik faktor penghambat maupun pendorong juga mempengaruhi pelaksanaan program BOS 2011.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah Al-Azhar 14, SMPN 12, dan SMP 29 . penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada tahun 2011 sering mengalami keterlambatan bahkan keterlambatan dalam penyaluran dana tahun ini lebih panjang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga menghambat kegiatan operasional sekolah. Kepala Sekolah SMPN 12 juga mengatakan bahwa prosedur dalam memperoleh Bantuan Operasional Sekolah tahun 2011 dirasa lebih rumit dibandingkan tahun sebelumnya maupun sesudahnya.

Ditambahkan juga oleh Kepala Sekolah SMPN 29 bahwa penyaluran BOS pada 2011 dinilai sangat tidak efektif, karena pada tahun 2011 pihak sekolah harus menunggu lama dana bantuan cair sehingga terpaksa menunda kegiatan operasional sekolah, atau jika memang benar-benar dibutuhkan, pihak sekolah menggunakan dana yang ada untuk melaksanakan kegiatan operasional sekolah.

Dari kasus tersebut diatas Bantuan Operasional Sekolah yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan ternyata pada tahun 2011 dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar, masih banyak keluhan dari sekolah mengenai penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional

Sekolah yang tidak sesuai dengan harapan mereka.

Untuk itu dilakukan penelitian mengenai sejauh mana pengaruh faktor terhadap pelaksanaan BOS pada tahun 2011 di Kota Semarang, dalam hal ini peneliti menjadikan SMP Al- Azhar 14, SMPN 12 dan SMPN 29 Semarang sebagai sampel penelitian. Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul “ **STUDI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI BOS TAHUN 2011 di SMP AL AZHAR 14, SMP 12 dan SMP 29 Kota SEMARANG** ”

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Studi Faktor Implementasi BOS 2011 adalah mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi.

C. TEORI

C.1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrasi publik. (Riant Nugroho, 2006:23). Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah dan berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur

masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat daerah itu. (Riant Nugroho,2006:25).

C.2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah tahap yang paling penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcomes adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau dalam waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.

Menurut Brigman & Davis 2000, Fenna 1998 & Turner & Hulme 1997 dalam dalam Badjuri dan Yuwono (2002, 113 - 129) ada beberapa hal yang dapat dipetik untuk kesuksesan implementasi kebijakan :

- Sebuah kebijakan publik harus didesain secara baik berdasarkan konteks persoalannya serta mekanisme bekerjanya harus dipersiapkan secara matang, jika tidak maka implementasinya akan terganggu.
- Semakin kompleks kesinambungan kebijakan dengan implementasi maka akan semakin kompleks persoalan dan beban yang akan dihadapi di lapangan, dimana bisa saja implementasi

kebijakan publik tersebut akan gagal.

- Implementasi kebijakan publik akan gagal jika terlalu banyak lembaga yang bermain.
- Sosialisasi kebijakan kepada mereka yang akan melaksanakan kebijakan sangatlah penting karena hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakan publik akan gagal jika evaluasi dilakukan setelah beberapa tahun diimplementasikan.

C.3. Model George C. Edward III

Model yang dikemukakan oleh Edward menunjukkan empat variable yang berperan penting dan pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan (indiahono, 2009) , antara lain:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian segala informasi mengenai kebijakan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Terdapat tiga unsur yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi terkait distribusi penyampaian informasi
- b. Kejelasan informasi yang disampaikan
- c. Konsistensi

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun unsur dalam sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf yang melaksanakan kebijakan

- b. Informasi yang diterima dalam melaksanakan kebijakan
- 3) Disposisi atau Sikap
Disposisi atau sikap merupakan kepatuhan oleh setiap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Unsur penting yang terkandung dalam disposisi adalah:
- 4) Struktur Birokrasi
suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Terhadap Implementasi BOS 2011.

1) Desain Kebijakan

Dalam desain kebijakan, sebuah kebijakan publik harus di desain secara baik berdasarkan konteks persoalannya serta mekanisme bekerjanya harus dipersiapkan secara matang, karena jika tidak maka implementasinya akan terganggu. Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada beberapa SMP dapat dilihat bahwa penyaluran dana BOS 2011 di Kota Semarang tidak berjalan dengan lancar, dimana dana BOS yang seharusnya disalurkan ke sekolah mengalami keterlambatan, sehingga hal ini menyebabkan kegiatan operasional sekolah menjadi terhambat.

1.1) Mekanisme dan Prosedur Kebijakan

Mekanisme penyaluran dana pada program BOS 2011 menurut SMP Negeri

D. METODE

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dan faktor-faktor yang menghambat atau mendukung dalam implementasi Program BOS 2011 di SMPI Al Azhar 14, SMPN 12 dan SMPN 29 Semarang.

A. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

29, SMP Negeri 12 dan SMP Islam Al Azhar 14 berubah. Dengan mekanisme yang berubah maka ada tambahan lembaga yang harus dilewati pada program BOS tahun 2011 di Kota Semarang, yaitu pencairannya menjadi melalui Kas Umum Negara, ke Kas Umum Daerah Kota Semarang, dari Kas Umum Daerah Kota Semarang ke Dinas Pendidikan Kota Semarang, dari Dinas Pendidikan Kota Semarang baru disalurkan ke masing-masing rekening sekolah yang ada di Kota Semarang. Dengan begitu secara otomatis prosedur yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam memperoleh dana BOS di SMP Kota Semarang juga bertambah.

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS pada 2011 dilakukan pemerintah dalam rangka pembagian urusan pemerintahan untuk memaksimalkan peran daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing.

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa desain perubahan mekanisme yang dilakukan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan peran daerah tidak diimbangi dengan pertimbangan dimana tujuan paling dasar diadakannya program BOS yaitu untuk memperlancar kegiatan operasional sekolah. Sehingga dalam hal ini Kota Semarang pun ikut merasakan dampak dari perubahan mekanisme tersebut dimana dengan perubahan mekanisme yang dilakukan justru membuat implementasi penyaluran dana ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang terlambat dan menghambat kegiatan operasional sekolah.

2) Kesenambungan Kebijakan dengan Implementasi

Semakin kompleks kesenambungan kebijakan dengan implementasi, semakin kompleks persoalan yang akan dihadapi dilapangan, dengan begitu bisa jadi implementasi kebijakan akan gagal.

Sementara itu menurut beberapa sekolah yang diteliti, mereka melaksanakan prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh dana BOS sesuai dengan aturan yang ada, termasuk aturan baru dari pemerintah kota berdasarkan perubahan mekanisme yang telah dilakukan pada 2011.

Dapat dilihat disini karena mereka melaksanakan prosedur yang ada dengan mengikuti pedoman yang diberikan maka kompleksitas pelaksanaan kebijakan sesuai dengan prosedur pada perubahan mekanisme tersebut. Sekolah harus mengikuti prosedur yang lebih panjang dan dirasa lebih rumit dalam memperoleh dana BOS sesuai dengan tambahan prosedur yang ada berdasarkan

mekanisme yang telah diubah. Prosedur kebijakan yang panjang tersebut membuat beberapa sekolah terlambat menyerahkan berkas-berkas yang digunakan sebagai syarat pencairan dana BOS. Sehingga hal ini mendukung keterlambatan pencairan dana BOS 2011 di sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi BOS 2011 di SMPI Al Azzhar 14, SMPN 12 dan SMPN 29 Semarang.

1. Komunikasi

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan pada program BOS 2011 di Kota Semarang telah disampaikan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. SMP mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota sebanyak dua kali. Saat sosialisasi Dinas Pendidikan Kota memberikan buku petunjuk teknis pelaksanaan program BOS 2011. Buku petunjuk teknis itu berfungsi sebagai pedoman apabila ada yang tidak dimengerti mengenai penyampaian informasi yang diberikan oleh dinas.

Menurut SMPN 29, SMPN 12 dan SMP Islam Al Azhar 14, mereka dapat mengerti akan apa yang disampaikan dengan bantuan juknis yang diberikan. Menurut SMPN 29 dan SMPN 12, penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota mengenai pelaksanaan program BOS 2011 dapat diterima dan dimengerti secara jelas. Hanya saja kendalanya yaitu teknis pelaksanaan sosialisasi dengan jumlah peserta sosialisasi yang banyak menyebabkan apa yang Dinas sampaikan kurang terdengar dengan jelas sehingga menyebabkan kesalahpahaman dalam

mengartikan informasi yang disampaikan oleh Dinas.

Dalam hal ini sebenarnya penyampaian informasi yang dilakukan pada program BOS 2011 di Kota Semarang sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, hanya saja perubahan mekanisme yang dilakukan pada 2011 membuat prosedur yang disampaikan dan harus dilalui menjadi tidak konsisten.

2. Sumberdaya

Pada SMP Islam Al Azhar 14 Kepala Sekolah menunjuk penjaga perpustakaan sebagai bendahara BOS dengan pertimbangan, tidak memiliki jam tatap muka untuk mengajar dan memiliki banyak waktu luang. Dengan begitu bisa fokus dalam mengerjakan prosedur program BOS tanpa harus terganggu kegiatannya. Bendahara BOS SMP Islam Al Azhar 14 mengerjakan semua yang dibutuhkan pada program BOS 2011 sendiri tanpa bantuan staf lain, dilihat dari kemampuan dalam mengoperasikan komputer, beliau cukup kompeten dalam mengerjakan prosedur BOS.

Berbeda dengan SMPN 29 yang mengaku tidak memiliki jumlah TU yang cukup untuk dijadikan bendahara BOS karena TU yang berstatus PNS hanya 2, sehingga SMPN 29 menunjuk guru sebagai bendahara BOS. Penunjukan tersebut tentunya dengan pertimbangan kompetensi beliau yang teliti, tekun, bisa menggunakan komputer dan mudah mengerti. Begitu pula SMPN 12 yang menunjuk guru sebagai bendahara BOS dengan pertimbangan segi kinerja yang baik, terampil, mengetahui IT serta mengerti akan pembukuan. Penunjukan guru sebagai bendahara BOS disini tentu saja sedikit banyak mengganggu kegiatan mengajar guru tersebut walaupun terkadang mereka mendapat bantuan dari

staff TU. Hal ini menggambarkan bahwa dalam program BOS 2011 Kota Semarang bisa dikatakan kurang memiliki jumlah staf yang cukup dalam mengimplementasikan program.

Implementor memperoleh informasi untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi saat pelaksanaan melalui monitoring dan pelaporan. Melalui informasi yang diperoleh, para implementor bisa segera melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sedangkan mengenai data kepatuhan, diperoleh informasi bahwa para implementor telah melaksanakan standar dan prosedur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Disposisi

Menurut hasil penelitian, sekolah-sekolah di Kota Semarang serta Dinas Pendidikan Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan program BOS 2011 sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Beberapa sekolah yang ada di Kota Semarang dapat mengatasi keterlambatan dana yang terjadi pada program BOS 2011 untuk dapat melaksanakan kegiatan operasional sekolah. Pelaksana BOS yang ada di sekolah-sekolah tersebut berani mengambil tindakan untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam RAKS dengan memakai terlebih dahulu uang koperasi sekolah uang yayasan serta tindakan lain seperti sistem tambal sulam supaya kegiatan operasional sekolah tidak terhambat.

4. Struktur Birokrasi

Dari ketiga sekolah yang diteliti, diperoleh pernyataan bahwa dana BOS tahun 2011 disalurkan melalui Kas

Umum Daerah ke Dinas Pendidikan Kota terlebih dahulu, berbeda dengan tahun sebelumnya yang masuk ke rekening sekolah tanpa melalui Kas Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kota. Pada tahun 2011, tanggungjawab untuk pelaksanaan penyaluran program BOS terbagi untuk Kementerian Pendidikan Nasional, Kas Umum Negara, Kas Umum Daerah, dan Dinas Pendidikan Kota. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Meluasnya struktur organisasi tersebut membuat koordinasi yang dilakukan semakin banyak pada pelaksanaannya sehingga membuat pencairan dana BOS pada tahun 2011 menjadi lama dan menyebabkan keterlambatan pada penyalurannya ke rekening sekolah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Desain Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa desain kebijakan pada kebijakan BOS 2011 mengalami perubahan pada mekanismenya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan mekanisme pada kebijakan BOS 2011 didesain dalam rangka membagi urusan pemerintah ke daerah. Perubahan tersebut membuat implementasi BOS 2011 di Kota Semarang mengalami beberapa hambatan sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana BOS 2011 ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang.

1.1 Mekanisme dan Prosedur Kebijakan

Penyaluran dana pada mekanisme BOS 2011 ke sekolah di Kota Semarang

melibatkan beberapa badan pelaksana yaitu dimulai dari Kemendiknas, Kas Umum Negara, Kas Umum Daerah Kota Semarang, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mekanisme pada penyaluran tersebut membuat penyaluran dana BOS pada 2011 mengalami keterlambatan. Keterlambatan yang ada dipengaruhi oleh karena jumlah badan pelaksana yang bertambah dari tahun sebelumnya membuat prosedur pelaksanaan program BOS juga bertambah. Prosedur pelaksanaan BOS yang lebih panjang membuat sekolah terkadang terlambat menyerahkan berkas ke Dinas Pendidikan Kota, sehingga hal ini mendukung keterlambatan dalam pencairan dana dimana dana BOS cair/ turun setelah berkas-berkas persyaratan telah dikirimkan.

5.1.2 Kesenambungan Kebijakan dengan Implementasi

Dalam melaksanakan kebijakan BOS 2011, sekolah telah melaksanakan sesuai dengan prosedur kebijakan yang ada. Prosedur kebijakan yang lebih panjang dan dirasa lebih rumit harus diikuti oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Prosedur yang panjang karena perubahan mekanisme tersebut terkadang membuat Dinas Pendidikan Kota Semarang mengalami keterlambatan dalam memperoleh berkas yang dikirimkan oleh sekolah. Hal ini membuat dinas mau tidak mau terlambat dalam menyerahkan berkas ke DPKAD sehingga pencairan dana BOS pun menjadi terlambat.

Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Dari hasil penelitian yang diperoleh, sekolah telah menerima informasi dengan jelas dari sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Namun pada sekolah lain, posisi tempat duduk wakil sekolah pada teknis pelaksanaan sosialisasi menjadi kendala dalam menerima informasi yang disampaikan. Sehingga hal tersebut membuat informasi yang disampaikan kurang terdengar dengan jelas.

b. Sumberdaya

Staf yang dimaksud dalam pengimplementasian program BOS 2011 yaitu Tim Manajemen program BOS 2011 baik dari Dinas Pendidikan Kota maupun sekolah yang mendapatkan dana BOS. Menurut penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa staf pelaksana kebijakan yang ada dirasa kurang, beberapa mengganggu kegiatan utama staf, ada yang mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan dan ada beberapa staf pembantu yang berasal dari luar tim manajemen BOS. Hal tersebut semakin mendukung keterlambatan pencairan dana BOS di Kota Semarang dikarenakan kurangnya staf yang tersedia membuat penyerahan berkas yang diperlukan mengalami keterlambatan.

Sedangkan untuk informasi yang diperoleh sekolah selalu melakukan monitoring/ kontrol dan pelaporan terhadap implementasi penggunaan dana BOS. Monitoring dan pelaporan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS, dilihat berdasarkan RAKS yang sedang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai hambatan yang ada dan mencari solusinya. Begitu pula Dinas Pendidikan Kota Semarang yang selalu melakukan

pemeriksaan terhadap berkas yang dikirim oleh sekolah untuk memperoleh informasi mengenai kesalahan yang mungkin terjadi.

c. Disposisi

Pelaksana program BOS di Kota Semarang dalam mengimplementasikan program BOS sesuai dengan aturan yang ada pada petunjuk teknis pelaksanaan. Para pelaksana kebijakan program BOS harus mengikuti prosedur yang ada sebagai persyaratan dalam memperoleh dana BOS pada tahun 2011. Mereka juga selalu melakukan kontrol dan pelaporan terhadap program BOS yang sedang dijalankan untuk mengetahui permasalahan yang mungkin terjadi. Hambatan yang ada saat implementasi program BOS dapat diatasi oleh para pelaksana program BOS dengan solusi penyelesaian yang telah disepakati oleh Tim Manajemen BOS.

d. Struktur Birokrasi

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2011 membuat lembaga yang terlibat pada penyaluran dana BOS di Kota Semarang ikut bertambah. Sebelumnya penyaluran dana BOS di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung ke sekolah-sekolah di Kota Semarang yang memperoleh BOS. Kemudian pada tahun 2011 lembaga penyalur dana BOS bertambah menjadi melalui Kas Umum Daerah ke Dinas Pendidikan Kota Semarang baru disalurkan ke masing-masing rekening sekolah. Dengan bertambahnya struktur organisasi tersebut maka mempengaruhi keterlambatan pencairan dana ke sekolah sehingga menghambat kegiatan operasional sekolah.

REKOMENDASI

1. Kurang Jelasnya Informasi yang diterima saat Sosialisasi

Hambatan pada kurang jelasnya informasi yang diterima saat sosialisasi disebabkan karena teknis pelaksanaan sosialisasi yang kurang baik. Salah satunya adalah penuhnya aula yang digunakan untuk sosialisasi, sehingga memungkinkan beberapa sekolah dengan posisi tempat duduk tertentu tidak dapat menerima informasi yang diberikan secara jelas. Saran untuk permasalahan ini adalah, sebaiknya untuk berikutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan cara mengelompokkan sekolah di Kota Semarang yang akan diberikan sosialisasi berdasarkan UPTD per kecamatan.

2. Kurangnya Staf Pelaksana Program BOS

Yang dimaksud kurangnya staf pelaksana disini adalah kurangnya pegawai dalam Tim Manajemen BOS serta sumberdaya yang membantu kinerja Tim Manajemen BOS. Hal tersebut disebabkan antara lain karena, sekolah tidak memiliki jumlah TU yang cukup dan kompeten untuk dijadikan bendahara BOS, serta tidak adanya pegawai dalam membantu kinerja Tim Manajemen BOS.

Saran untuk hal tersebut yang pertama yaitu, memberikan pelatihan kepada staf TU yang kurang kompeten untuk dapat melaksanakan program BOS dengan baik. Kedua, dengan pembagian beban kerja, yaitu pegawai yang terampil dan kompeten melimpahkan beberapa beban kerja kepada pegawai lain yang memiliki beban kerja yang ringan. Dengan pembagian kerja tersebut diharapkan pelaksanaan kinerja bendahara BOS maupun Tim Manajemen BOS dapat berjalan dengan baik tanpa memberatkan kinerja salah satu pegawai.

3. Bertambahnya Struktur Birokrasi

Sedangkan untuk bertambahnya struktur organisasi, dengan bertambahnya lembaga yang terlibat dalam pencairan program BOS, maka juga menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS ke sekolah pada 2011. Bertambahnya struktur organisasi membuat alur penganggaran semakin rumit, dikatakan rumit pada 2011 karena data yang diperlukan semakin banyak. Untuk itu, alangkah baiknya apabila program BOS dikembalikan pada kebijakan awal yang lebih sederhana pada mekanismenya yaitu dimana pencairan dana BOS langsung dari pemerintah provinsi ke sekolah tanpa melalui Kas Umum Daerah dan Dinas Pendidikan Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.

Sugiyono. 2006.
Metode Penelitian Administrasi. CV
Alfabeta: Bandung

Suwitri, Sri. 2009. *Konsep Dasar
Kebijakan Publik.* Badan Penerbit
Universitas Diponegoro: Semarang.

Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar .
2003. *Kebijakan Publik konsep
dan strategi* . Undip Semarang.